

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis kesiapan dalam Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota dan pembahasan yang mengacu pada tujuan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Komponen input :
 - a. Pelaksanaan kebijakan dilapangan ditemukannya perbedaan persepsi antara lintas sektor terkait. Pemerintah daerah dalam hal ini DPRD dan Badan Keuangan Daerah menyamakan PPK BLUD sebagai APBD yang harus dibelanjakan sepenuhnya tiap tahun.
 - b. Pelaksanaan PPK BLUD memberikan manfaat bagi RS untuk memenuhi kebutuhan tenaga dengan status non PNS.
 - c. Pelaksanaan PPK BLUD di RS memberikan manfaat bagi RS dalam peningkatan kinerja keuangan.
 - d. Pelaksanaan PPK BLUD membantu dalam peningkatan sarana dan prasarana, hal ini terlihat dari belanja modal dan perbaikan gedung RS yang banyak dialokasikan dari dana BLUD.
2. Komponen proses :
 - a. Komponen substantif diketahui RS melakukan penyelenggaraan pelayanan umum dan pelaksanaan PPK BLUD membantu RS dalam penyelenggaraan barang dan jasa, dimana sebelum

pelaksanaan PPK BLUD penyelenggaraan barang dan jasa berdasarkan pengajuan kepada pemerintah daerah.

- b. Komponen teknis diketahui pelaksanaan PPK-BLUD di RSUD dr. Achmad Darwis Kab. Lima Puluh Kota mampu meningkatkan kinerja pelayanan.
- c. Komponen administratif diketahui penilaian komponen administratif RSUD dr. Achmad Darwis memiliki hasil penilaian 86% sebelum pelaksanaan PPK-BLUD berada pada kategori memuaskan, sedangkan setelah pelaksanaan PPK-BLUD terjadi peningkatan menjadi 93,5% berada pada kategori memuaskan.

3. Komponen Output

Penilaian Pelaksanaan PPK-BLUD RSUD dr. Achmad Darwis baru dilakukan oleh BPKP, namun audit internal belum dilakukan karena RS belum memiliki satuan pengawasan internal (SPI).

7.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota
Pemerintah seharusnya lebih aktif dalam mensosialisasikan tentang pentingnya pelaksanaan BLUD di RS dan perbedaannya dengan APBD sehingga diperoleh dukungan stakeholder terkait dalam pelaksanaan BLUD di RS.
2. Bagi Direktur RSUD dr. Achmad Darwis Kab. Lima Puluh Kota
 - a. Melakukan sosialisasi secara terus menerus dan menyeluruh kepada stakeholder sampai ke staf mengenai prinsip PPK BLUD

- dan manfaat yang diperoleh setelah menerapkan PPK BLUD sehingga komitmen organisasi semakin meningkat untuk membantu RS mencapai tujuannya untuk menerapkan PPK BLUD.
- b. RSUD dr. Achmad Darwis perlu meningkatkan kinerja pelayanan dengan manajemen yang baik dan melakukan pengembangan pelayanan.
 - c. RS perlu melatih petugas untuk menjadi kenggotaan satuan pengawas internal (SPI) sesuai dengan amanat dari pelaksanaan PPK-BLUD menurut Permendagri No 61 tahun 2007.
 - d. Memanfaatkan secara maksimal fleksibilitas yang diberikan dalam PPK BLUD dalam operasionalnya, yaitu penerimaan dapat langsung digunakan untuk operasional dan surplus dapat digunakan untuk investasi yang menambah pendapatan BLUD.
 - e. Perlu adanya revisi rencana strategi bisnis tahun 2017-2022, perihal penetapan indikator target pendapatan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
- Peneliti menyarankan agar melakukan penelitian terhadap implementasi PPK-BLUD pada rumah sakit umum daerah lainnya di Provinsi Sumatera Barat lainnya dan membandingkan hasilnya dengan RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota.